



**IMPLEMENTASI *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA* 1982 (UNCLOS 1982) TERHADAP PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :  
**MELLISA MANDASARI**  
**030910101206**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap syukur Allhamdulillah dan penuh rasa terima kasih, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada :*

- 1. Kedua orang tuaku (Papa dan Mamaku) tercinta, terima kasih atas segala doa, dukungan dan pengorbanannya.*
- 2. Kedua adikku Alfred dan Faris terima kasih atas segala dukungannya.*
- 3. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.*

## **MOTTO**

*“Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita-cita”*

*“Berusaha terus untuk mengisi kekurangan adalah  
keberanian yang luar biasa”*

*(penulis)*

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELLISA MANDASARI

NIM : 030910101206

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "*Implementasi United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Oktober 2007

yang menyatakan

**MELLISA MANDASARI**

**NIM 030910101206**

## RINGKASAN

**Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)***; Mellisa Mandasari, 030910101206; 2007. 67 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Alur-alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ditetapkan sebagai implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982* merupakan hasil Konferensi Hukum Laut III yang diadakan di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS 1982 ini berisi 17 bagian dan 9 annex yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksploitasi lainnya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. ALKI ditetapkan untuk memberi hak bagi masyarakat Internasional untuk melintas di perairan kepulauan Indonesia. Penulisan ini meneliti tentang pengaturan ALKI dan dampak yang ditimbulkan adanya penetapan ALKI.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori negara kepulauan dimana suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau. Sedangkan gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya. Penulisan ini mempergunakan cara berpikir deduktif dengan menggunakan hukum normatif.

Pengaturan ALKI dalam pelaksanaannya sering timbul berbagai pelanggaran / kasus keamanan di sepanjang ALKI. Pelanggaran / kasus tersebut dapat berupa gangguan terhadap kapal-kapal pengguna ALKI yang mengalami perompakan atau bahaya navigasi, pelanggaran peraturan dan undang-undang oleh kapal-kapal pengguna ALKI selama berlayar melintasi ALKI seperti pengambilan sumber daya alam dan kekayaan alam secara ilegal, riset dan survei ilegal, penyelundupan barang komoditas dan imigrasi gelap. Dampak yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya ALKI ditinjau dari aspek yuridis, politis, keamanan dan kesejahteraan.

## ABSTRACT

***Implementation of United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) To The Designation of Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) As; Mellisa Mandasari, 030910101206; 2007. 67 page; Internasional Relation Department of Social Science and Politics Faculty of Jember University.***

*Indonesian Government was designated Indonesian Archipelagic Sea Lanes, on 28th June, 2002 through Indonesian Government Regulation Number 37,2002 on the Rights and Obligations of Foreign Ships and Aircraft exercising the Right of Archipelagic Sea Lanes Passage through designated Sea Lanes. Archipelagic sea lanes to be used for exercising the right of archipelagic sea lanes passage are three Indonesian Archipelagic sea lanes passage from north to south or in the opposite direction. Archipelagic sea lane mean as sea lane for the passage of foreign ships or foreign aircraft, in a normal mode solely for the purpose of continuous, expeditious and unobstructed transit through or over the archipelagic waters and the adjacent territorial sea between on part of the high seas or Indonesian exclusive economic zone and another part of the high seas or Indonesian exclusive economic zone. Such sea lanes and air routes shall traverse the Indonesian archipelagic waters and the adjacent territorial sea and shall include all normal passage routes' used as routes for international navigation or over flight.*

*This paper using the theory of archipelagic country which is are Nations that consisted of by one or more archipelago bunch which can include the whole island. In spite of archipelago bunch mean an island bunch is an inclusive part of island, territorial water among the island bunch and others exist natural which has relation with one to another. This paper using the deductive, as a way to get closer with a normatif law.*

*Arrangement ALKI in its execution often arise a various collision/security case alongside ALKI. The case can be the piracy, collision of regulation and law by a ship which is sailing during the ALKI, for example the experienced resource intake and natural resource by illegal, reseach, into and survey the ilegal, smuggling of goods commodity ang illegal imigration and the danger of navigation. Affect the arising out of refering to specifying of ALKI evaluated from aspect yuridicly, political, security and prosperity.*

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982 Terhadap Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Oktober 2007

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr.A.Khusyairi,MA

NIP. 130 261 689

Drs.H.Alfan Djamil, M.Si

NIP. 131 631 957

Anggota :

1. Dra. Sri Yuniati, M.Si ( ..... )  
NIP. 131 832 319
2. Drs.Agung Purwanto,M.Si ( ..... )  
NIP. 132 056 184
3. Heri Alfian.S.Sos, M.Si ( ..... )  
NIP. 132 309 808

Mengesahkan

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Drs. H. Uung Nasdia, BS.W.,MS

NIP. 130 674 836

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan karya ilmiah dengan judul “Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982 Terhadap Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”. Karya ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. H. Uung Nasdia, BSW, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Djoko Poernomo, M.Si selaku Pembantu Dekan I, Drs. H. M. Affandi, MA selaku Pembantu Dekan II dan Drs.Hartono Julianto, M.Si selaku Pembantu Dekan III.
3. Drs. Supriyadi.M.Si selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Djoko Susilo.M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Drs. H. Alfam Djamil, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga terselesaikannya karya tulis ini.
6. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Dosen Pembimbing II dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga terselesaikannya karya tulis ini.



7. Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

8. Almamater tercinta dan teman-teman seperjuangan Jurusan HI angkatan 2003.

Kemudian kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, sahabat-sahabatku dan seluruh keluarga besar penulis mengucapkan terima kasih. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 1 Oktober 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persembahan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Ringkasan.....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Prakata.....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Lampiran.....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	11
1.2.1 Batasan Materi.....	11
1.2.2 Batasan Waktu.....	11
1.3 Rumusan Masalah .....	11
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	12
1.5 Hipotesis .....	16
1.6 Metode Penelitian .....	17
1.6.1 Metode Pengumpulan Data .....	17
1.6.2 Metode Analisa Data .....	17
1.7 Pendekatan.....	18
<b>BAB 2.DASAR-DASAR PEMIKIRAN DITETAPKANNYA ALKI.....</b>	<b>21</b>
2.1 Sejarah Perairan Indoensia .....	21
2.1.1 Perairan Indonesia Menurut Deklarasi Djuanda.....	23

2.1.2	Perairan Indonesia Setelah Deklarasi Djuanda.....	26
2.2	Negara Kepulauan, Perairan Kepulauan dan Alur Laut Kepulauan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.....	27
2.2.1	Definisi Negara Kepulauan.....	27
2.2.2	Perairan Kepulauan.....	28
2.2.3	Alur Laut Kepulauan.....	31
2.3	Hak Lintas Laut Menurut Konvensi Hukum Laut.....	32
2.3.1	Hak Lintas Damai ( <i>The Right of Innocent Passage</i> ).....	33
2.3.2	Hak Lintas Transit.....	37
2.3.3	Hak Lintas Alur Laut Kepulauan .....	39
2.4	Hak Lintas Laut di Wilayah Perairan Indonesia.....	41
2.4.1	Hak Lintas Damai.....	44
2.4.2	Hal Lintas Transit.....	44
2.4.3	Hak Lintas Alur Laut Kepulauan.....	45
2.5	Hak dan Kewajiban kapal Asing.....	45
2.5.1	Peraturan Pemerintahan No 36 Tahun 2002.....	45
2.5.2	Peraturan Pemerintahan No 37 Tahun 2002.....	48
<b>BAB 3.UPAYA PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA..</b>		52
3.1	Upaya Dalam Negeri.....	52
3.1.1	Forum Strategi TNI-AL IV.....	52
3.1.2	Rapat Kerja Nasional.....	55
3.2	Pertemuan dan Konsultasi Informal .....	57
3.3	Perjuangan dalam FORUM IMO/IHO.....	59
<b>BAB 4.IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN PENGATURAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA.....</b>		62
4.1	Pengaturan Wilayah ALKI.....	62
4.2	Penetapan Wilayah ALKI .....	66
4.3	Pelaksanaan ALKI di Indonesia.....	67

4.4 Dampak Yang Ditimbulkan Sehubungan dengan Penetapan ALKI	69
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- B. Peta ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
- C. Peta Macamnya Hak Lintas di Wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional
- D. Undang Undang No.17 tahun 1985
- E. Undang-Undang No.6 Tahun 1996